

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **I.1. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-iP) adalah suatu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk evaluasi semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan setiap tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-iP) selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai acuan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-iP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Kabupaten Berau selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau sebagai sub sistem dan sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi Masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Berau, capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, Melainkan juga untuk Provinsi dan Nasional.

## **I.2. Tugas Pokok dan Fungsi.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau nomor 50 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, Dinas Pendidikan Kabupaten Berau mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Bupati di bidang pendidikan. dimana dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Berau menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan dibidang Pendidikan
2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendidikan
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

ditunjang dengan rincian struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 50 tahun 2016 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat Serta Bahasa dan Sastra Membawahkan :
  - a. Seksi Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat serta Bahasa dan Sastra
  - b. Seksi Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan :
  - a. Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Sekolah Dasar
  - b. Seksi Kesiswaan dan Kreatifitas Sekolah Dasar
  - c. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Membawahkan:
  - a. Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama
  - b. Seksi Kesiswaan dan Kreatifitas Sekolah Menengah Pertama
  - c. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah

6. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Membawahkan :
  - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
  - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
  - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Semolah Menengah Pertama
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional

### **I.3. Isu Strategis**

Isu-isu Strategis berdasarkan perubahan RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Pendidikan Kabupaten Berau tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Pertumbuhan penduduk kabupaten Berau yang sangat pesat;
2. Daya tampung disekolah yang masih kurang memadai sehingga masih banyak sekolah yang doublesif/ siang hari dan sore hari ;
3. Masih banyaknya pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan sarjana/S1 (khususnya guru SD) ;
4. Keterjangkauan akses masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan bermutu seluas-luasnya ;

### **I.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan laporan Kinerja Pemerintah (LKJ-iP) Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Tahun 2016 yaitu

## BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan Penjelasan Umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

## BAB II PERENCANAAN KINERJA ORGANISASI

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis Penyebab keberhasilan / Kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### BAB IV PENUTUP

Pada sub bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

### LAMPIRAN

- 1). Perjanjian Kinerja Tahun Yang Bersangkutan
- 2). Rencana Kerja Tahunan
- 3). Pengukuran Kinerja
- 4). Pendukung Lain

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) sebagai Penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra yang akan dilakukan oleh satuan organisasi/kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan.

Dalam Pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Berau, Dinas Pendidikan Kabupaten Berau selaku penanggung jawab untuk menyediakan Layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki kewajiban dalam menyediakan layanan serta sarana pendidikan.

Perencanaan Pembangunan di bidang pendidikan, tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang sesuai dengan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, yaitu terwujudnya Pendidikan yang bermutu dan terjangkau melalui optimalisasi Layanan.

#### **II.1. RENCANA STRATEGIS**

Renstra di bidang pendidikan sebagai penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau adalah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka upaya menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan bidang

pendidikan dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Berau.

Rencana Startegis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memanfaatkan seluruh pengetahuan dan keahlian serta sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis regional, nasional maupun global.

Renstra Dinas pendidikan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja dinas pendidikan kabupaten berau pada tahun 2016-2021 dalam sebuah dokumen perencanaan pendidikan sebagai acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Penyusunan dokumen perencanaan strategis, harus tetap berpedoman pada RPJPD dan RPJMD serta RKPD Kabupaten Berau, dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang di anggap penting dan strategis

## **II.2. Visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau**

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dijabarkan dalam agenda pembangunan Kabupaten Berau. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok serta fungsi yakni meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam melaksanakan tugas desentralisasi di bidang pendidikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati untuk membuat visi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau. Sehingga dengan begitu, Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mengantisipasi tentang pendidikan kedepan menuju kondisi yang diinginkan dan secara terus menerus dapat mengembangkan peluang dan inovasi di bidang pendidikan.

Meningkatkan persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Berau untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau mufakat.

Rumusan visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun kedepan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau didasarkan kepada rumusan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah Bupati terpilih yang dituangkan

didalam RPJMD 2016-2021 pada misi ke-3 yang berbunyi “ **MEWUJUDKAN MAYARAKAT YANG CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA, BERMATABAT DAN BERDAYA SAING TINGGI** ” yang mengamanatkan adanya peningkatan layanan pendidikan di Kabupaten Berau untuk 5 (lima) tahun kedepan, di samping perlunya peningkatan layanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Berau. Kebijakan-kebijakan yang disusun diantaranya peningkatan peluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan, yang dalam hal ini perlu adanya keikutsertaan seluruh masyarakat, baik melalui peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan maupun melalui gerakan masyarakat peduli pendidikan. Maka rumusan visi Dinas Pendidikan berbunyi sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG ONTERAKTIF, BERKEADILAN, BERKUALITAS YANG BERLANDAS AKHLAK MULIA DAN MERATA (INTAN PERMATA)”**

Visi diatas sebagai pijakan dan landasan bagi seluruh pelaksana pendidikan dalam membangun dan mengembangkan pendidikan di Kabupaten Berau. Selain itu visi tersebut juga merupakan target capaian yang menjadi cita-cita di bidang pendidikan dan hendak diwujudkan melalui program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Adapun penjelasan masing-masing pokok visinya dapat dilihat pada table berikut ini :

No	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
1	Terwujudnya Pendidikan yang Interaktif, Berkeadilan, Berkualitas yang Berlandaskan Akhlak Mulia dan Merata (INTAN PERMATA)	Pendidikan yang Interaktif	Pendidikan yang dilaksanakan dengan saling berinteraksi sehingga menciptakan peserta-peserta didik yang memiliki keterampilan, kreatif dan aktif
		Berkeadilan	Pendidikan dilaksanakan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan status social dan ekonomi, dan menjamin akses pendidikan bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas
		Berkualitas	Pendidikan dilaksanakan dengan parameter dan standar yang jelas untuk dapat menghasilkan output yang memiliki kompetensi global, berprestasi akademik dan non akademik dapat mengikuti dan menjadi pelopor dalam pembaharuan dan perubahan dengan cara memberdayakan sumber pendidikan secara optimal melalui pembelajaran yang komprehensif sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang
		Berlandaskan Akhlak Mulia	Pendidikan mengajarkan untuk memiliki sifat-sifat dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai ajaran agama dan etika moral yang baik dan kuat
		Merata	Sistem Pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada

			seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan
		Intan Permata	Batu yang berharga dan Berkilau, diharapkan Pendidikan Kabupaten Berau akan seperti Intan Permata yang menjadi pendidikan yang berkilau yang mampu bersaing ditengah era globalisasi

**Tabel II.2. Perumusan Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau**

Kabupaten Berau sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjalankan kewenangan Bupati Kabupaten Berau dalam rangka desentralisasi di bidang pendidikan. Maka seluruh komponen dan sumberdaya yang ada harus difungsikan sebagai wahana (fasilitas) dalam pembangunan pendidikan ini juga didasarkan kepada analisa kondisi factual yang ada, seperti : politik, ekonomi, social, cultural masyarakat Kabupaten Berau yang mengalami perkembangan begitu cepat, keadaan demografi, sumberdaya, ketersediaan sarana prasarana bidang pendidikan, termasuk kekuatan pendukung berupa system regulasi baik dari pusat maupun propinsi yang mampu mendukung proses pembangunan pendidikan di Kabupaten Berau 5 (lima) tahun kedepan, serta kemungkinan-kemungkinan munculnya faktor-faktor eksternal pendukung baik dari masyarakat, kalangan swasta, kalangan dunia usaha dan industri serta para *stakeholders* pendidikan.

Yang sudah dapat dipastikan titik berat dari visi tersebut adalah memfasilitasi dan mendorong kepada terciptanya iklim pembangunan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses layanan serta sudah tentu upaya peningkatan mutu pendidikan.

Untuk mewujudkan visi pendidikan tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Berau telah menetapkan 5 (lima) misi, yakni:

1. Memperkuat tata kelola manajemen pendidikan ;
2. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Kabupaten Berau ;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia dan bermoral ;
4. Mewujudkan jenjang pendidikan dasar dan menengah memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)
5. Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan ;

Keterkaitan visi dan misi yang dimiliki oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Berau sangat diperlukan guna menunjang tujuan yang diinginkan oleh semua aspek yang ada pada masyarakat Kabupaten Berau.

Dalam penjabaran visi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau tergambar keinginan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dalam menjabarkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih dalam kalimat “ **Terwujudnya Pendidikan**

**yang Interaktif, Berkeadilan, Berkualitas Yang Berlandaskan Akhlak Mulia, Dan Merata "**

### **II.3. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukakn untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan yang sedang terjadi dan menanganiisu strategis yang sedang dihadapi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan mampu memberikan perubahan yang positif bagi pendidikan Kabupaten Berau serta menghasilkan pendidikan dan Sumber daya Manusia yang lebih maju, lebih bermutu dan lebih berkualitas dalam jangka kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan, pada kurun waktu tertentu

Didasarkan kepada visi dan misi Dinas Pendidikan tersebut, maka Dinas Pendidikan menetapkan tujuan sebagai arah pembangunan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Berau sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Internal Organisasi
2. Meningkatkan Akses dan Kualitas PAUD
3. Meningkatkan kesamaan kesempatan memperoleh pendidikan

4. Mengembangkan kurikulum muatan lokal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan Pendidikan Non Formal
5. Meningkatkan Keaksaraan
6. Meningkatkan kualitas Pembinaan Profesionalitas Tenaga Pendidik
7. Meningkatkan pengembangan IT dalam kegiatan belajar mengajar dan manajemen satuan pendidikan
8. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah

Dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Berau telah menetapkan tujuan yang kemudian didefinisikan ke dalam uraian sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kompetensi dan Integritas Sumber Daya Manusia
2. Tersedianya Data dan Informasi Pendidikan yang akurat
3. Meningkatnya Layanan administrasi Perkantoran
4. Meningkatnya Aksesibilitas PAUD
5. Meningkatnya kualitas dan Profesionalisme Tenaga Pendidik PAUD
6. Menurunnya Angka Putus Sekolah
7. Terwujudnya pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan non formal
8. Menurunnya Angka Buta Aksara
9. Meningkatnya Profesionalisme Pendidik
10. Meningkatnya kualitas hidup drajat masyarakat, serta dapat mengantarkan Kabupaten Berau mencapai kemakmuran

#### **II.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Berau**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 dimana salah satu tujuannya adalah Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Masyarakat Kabupaten Berau yang Mandiri, bersaing tinggi.

Untuk menjabarkan tujuan diatas diperlukan sasaran yang harus dicapai serta indikatornya agar dapat diukur keberhasilannya dengan menetapkan target-target sesuai dengan tugas dan fungsi pendidikan.

Indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD perlu dioperasionalkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Penjabaran untuk dicapai dan dapat diukur keberhasilannya.

**Berikut Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan  
Kabupaten Berau**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Sasaran</b>
1	Meningkatnya persentase Penduduk yang melek huruf (Tidak Buta Aksara)	Mengoperasionalkan dengan Indikator menurunnya angka buta aksara setiap tahunnya
2	Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	Pengukuran indikator melalui : 1. Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia Dini 2. Angka Partisipasi Sekolah Dasar 3. Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama 4. Angka Partisipasi Sekolah Menengah

**Tabel II.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan  
Kabupaten Berau**

**II.5. Pengukuran Kinerja**

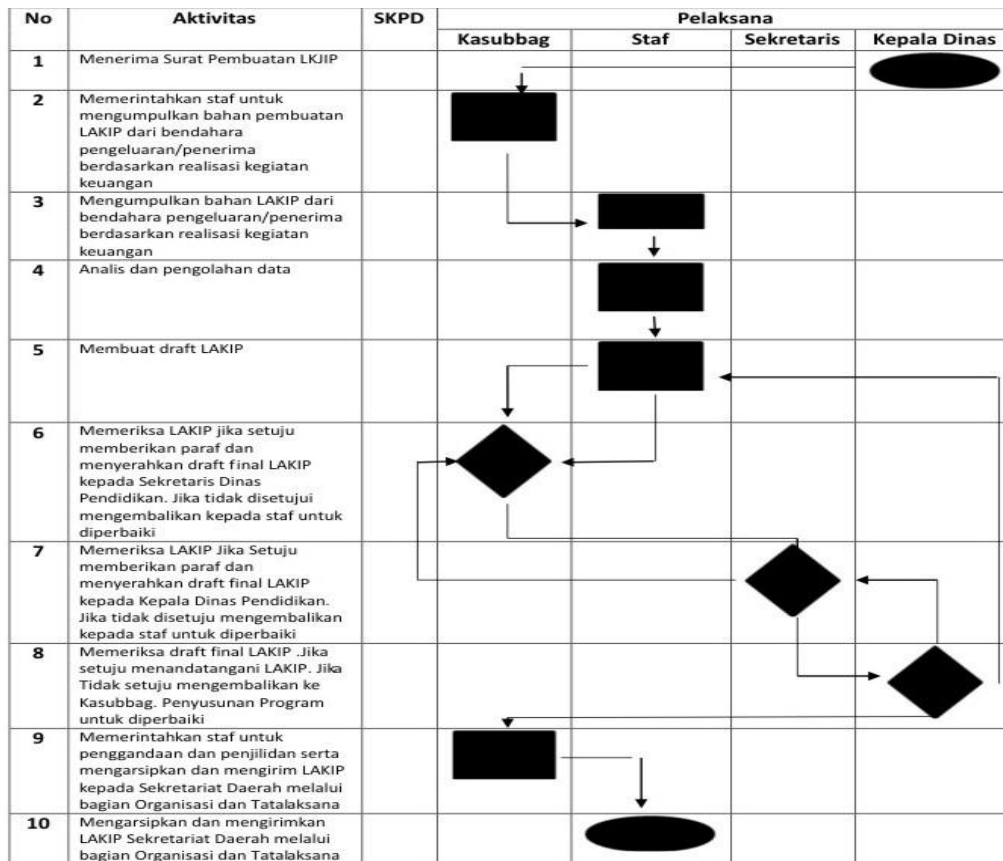
Secara umum Istilah

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### III.1. Capaian kinerja Organisasi

Pengukuran target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel, selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan Kota Berau untuk tahun 2017. Adapun pelaksanaan SOP tentang mekanisme Pengumpulan Data dalam Penyusunan LKJIP tahun 2017 sebagai berikut :



Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan kabupaten Berau tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

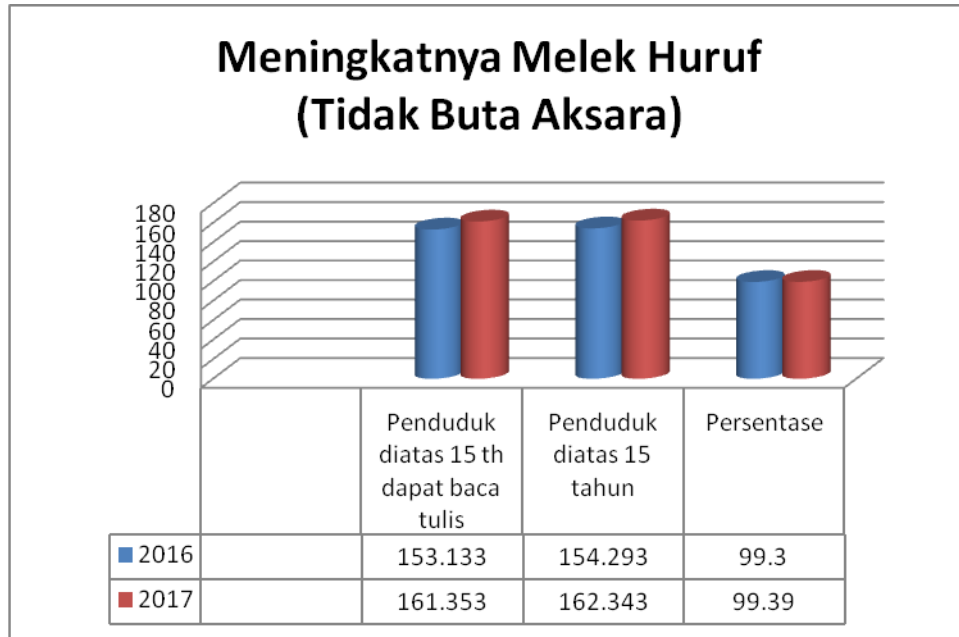
No	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)
1	Meningkatnya Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	99	99.30	99.39
2	Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	8,53	8,62	8.70

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan :

### **1. Meningkatnya Melek Huruf ( Tidak Buta Aksara )**

Penuntasan Buta Aksara merupakan bagian dan fokus dari peningkatan *Human Capital* Hal ini mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dan pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial. Dalam proses perhitungan indikator kinerja Utama yang menjelaskan tentang menurunnya Angka Buta Aksara hal ini bisa di peroleh Berdasarkan data Pendudk yang berusia >15 tahun melek huruf tahun 2017 sudah mencapai target yang di tentukan 99 % hal ini dikarenakan Angka Buta Aksara sudah terrealisasikan sebesar 99.39 dimana hasil tersebut di dapat dari perhitungan jumlah penduduk usia >15

tahun ke atas dapat baca tulis sebanyak 153.133 orang berbanding dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang berjumlah 154.293 orang.



dengan persentasi 99.25 di tahun 2017 hasil ini sudah mencapai target dari target yang telah ditentukan di tahun 2017, dalam perbandingan antara angka tidak buta aksara di tahun 2016 dan 2017 maka ada peningkatan 9% dimana hasil ini sama – sama memenuhi target yang telah di tentukan baik di tahun 2016 maupun di tahun 2017.

**Adapun permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam menurunnya buta aksara ini diantaranya**

1. Penurunan jumlah penduduk usia melek huruf usia 15 tahun keatas.
2. Kurangnya minat penduduk mengikuti program paket c
3. Penduduk yang mengikuti paket C hanya kepada penduduk dalam masa kerja dimana pnggunaannya diperuntukkan untuk kepentingan dalam

keperluan pekerjaan, sedangkan yang tidak mengikuti program yang ditentukan merupakan penduduk yang dalam masa mencari kerja.

Dari permasalahan yang mengakibatkan capaian realisasi dari Indikator Penduduk yang berusia >15 tahun melek Huruf (tidak buta aksara) **Maka**

**Evaluasi dalam penyelesaian Buta Aksara tersebut yaitu ;**

1. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Berau melalui Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) agar lebih meningkatkan program – program kinerjanya baik itu melalui Kasi Sarana Prasarana, Kasi Kelembagaan dan Kreatifitas.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau melakukan pengarahan agar meng evaluasi prioritas program contohnya; menggambarkan kriteria yang dianggap penting dalam menentukan alternative prioritas kebutuhan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau meng evaluasi program yang terpusat untuk pengambilan keputusan model evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa unsure program yaitu ; Konteks, masukan, proses, dan hasil.

**2. Meningkatnya Rata – Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator Rata - rata ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan.

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau angka rata-rata lama sekolah di kabupaten berau Tahun 2016 berjumlah 8.62 % dimana hal ini sudah mencapai dari target yang di tentukan Pemerintah Kabupaten Berau, dimana target itu tercantum dalam RPJMD kabupaten yang menjelaskan bahwa target nya 8.53 %, Dengan informasi ini pimpinan daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mengambil kebijakan, dalam rangka meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah. Misalnya pencaangan Wajib Belajar 12 Tahun dengan sebuah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah, meningkatkan pembangunan unit sekolah atau ruang kelas baru, pemberian beasiswa bagi penduduk kurang mampu, pembebasan uang sekolah, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, Adapun indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Berau adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Angka Partisipasi Sekolah biasanya disebut APS adalah Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan, APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di

suatu wilayah baik Provinsi, Kabupaten atau Kota di Indonesia. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah di suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2015 Rata – Rata Lama sekolah di Kabupaten Berau adalah 8,62 tahun angka ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia sekolah ( 7 tahun atau lebih ) di Kabupaten Berau dapat menyelesaikan sekolah hanya sampai kelas 2 SMP sehingga untuk mencapai target rata-rata lama sekolah usia 9 tahun masih membutuhkan upaya lebih keras lagi dari pemerintah Daerah Kabupaten Berau. Oleh karena itu selain menjadikan hal ini sebagai pekerjaan rumah dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, juga menjadi masukan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembagungan berbasis partisipasi masyarakat, sehingga arah komunikasi pembangunan lebih dapat tersampaikan dengan baik.

Adapun solusi dalam penyelesaian masalah dalam peningkatan rata-rata lama sekolah antara lain Dinas Pendidikan Kabupaten Berau mewajibkan setiap sekolah menerima murid yang berasal dari warga yang tidak mampu Selain itu perlu juga dilakukan dengan membuat perangkat atau aturan dan petunjuk teknisnya, untuk mendorong masyarakat yang berusia sekolah untuk bersekolah dan minimal dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

Dari 2 (dua) Indikator tersebut maka telah dilakukan evaluasi dalam



menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat di antara 2 (dua) indikator tersebut.

**Rapat Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan Kab.Berau**

### **III.2. Realisasi Anggaran**

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Berau untuk membiayai 8 program sebesar Rp. 161.936.627.100.00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 139.756.631.370,00

## Rincian Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	KEUANGAN	SISA ANGGARAN (Rp)
		Rp	Rp	
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>48,498,304,000.00</b>	<b>47,445,444,517.00</b>	<b>1,052,859,483.00</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2,500,000.00	2,407,350.00	92,650.00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	663,000,000.00	511,640,718.00	151,359,282.00
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100,000,000.00	86,863,691.00	13,136,309.00
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	382,512,000.00	327,825,000.00	54,687,000.00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20,000,000.00	19,906,000.00	94,000.00
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25,000,000.00	23,915,000.00	1,085,000.00
7	Penyediaan alat tulis kantor	125,000,000.00	125,000,000.00	-
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40,000,000.00	39,650,000.00	350,000.00
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	28,160,000.00	28,160,000.00	-
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15,000,000.00	14,899,000.00	101,000.00
11	Penyediaan makanan dan minuman	50,000,000.00	50,000,000.00	-
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350,000,000.00	349,955,648.00	44,352.00
13	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100,000,000.00	82,630,000.00	17,370,000.00
14	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran	46,597,132,000.00	45,782,592,110.00	814,539,890.00

<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>459,618,000.00</b>	<b>453,141,000.00</b>	<b>6,477,000.00</b>
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	164,618,000.00	163,619,000.00	999,000.00
2	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	220,000,000.00	216,082,000.00	3,918,000.00
3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	75,000,000.00	73,440,000.00	1,560,000.00
<b>3</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>157,500,000.00</b>	<b>144,252,000.00</b>	<b>13,248,000.00</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	7,500,000.00	7,460,000.00	40,000.00
2	Penyelenggaraan Ekspose Kinerja Pendidikan	150,000,000.00	136,792,000.00	13,208,000.00
<b>4</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>469,286,050.00</b>	<b>331,624,050.00</b>	<b>137,662,000.00</b>
1	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	150,000,000.00	142,706,000.00	7,294,000.00
2	BOP PAUD (DAK) TK Negeri Pembina Tanjung Redeb	36,000,000.00	36,000,000.00	-
3	BOP PAUD (DAK) TK Negeri Pembina Gunung Tabur	36,000,000.00	36,000,000.00	-
4	BOP PAUD (DAK) TK Negeri Pembina Talisayan	36,000,000.00	36,000,000.00	-
5	BOP PAUD (DAK) TK LB Negeri Tanjung Redeb	9,000,000.00	-	9,000,000.00
6	BOP PAUD (DAK) PAUD Negeri Sambaliung	36,000,000.00	-	36,000,000.00
7	BOP PAUD (DAK) PAUD Negeri Pulau Derawan	36,000,000.00	-	36,000,000.00
8	BOP PAUD (DAK) PAUD Negeri Teluk Bayur	36,000,000.00	-	36,000,000.00
9	Pengembangan wawasan bagi pendidik PAUD	50,000,000.00	45,621,000.00	4,379,000.00
10	BOP Pendidikan Anak Usia Dini (DAK)	44,286,050.00	35,297,050.00	8,989,000.00
<b>5</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>101,992,950,750.00</b>	<b>85,860,164,281.00</b>	<b>16,132,786,469.00</b>

1	Pembangunan gedung sekolah	7,304,801,524.00	7,068,142,000.00	236,659,524.00
2	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	1,290,000,000.00	1,266,986,000.00	23,014,000.00
3	Penambahan ruang kelas sekolah	7,710,000,000.00	7,101,726,000.00	608,274,000.00
4	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	3,485,000,000.00	3,427,872,000.00	57,128,000.00
5	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	895,000,000.00	858,858,000.00	36,142,000.00
6	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	1,651,910,000.00	1,628,576,500.00	23,333,500.00
7	Pengadaan mebeluer sekolah	4,800,000,000.00	4,731,820,000.00	68,180,000.00
8	Pengadaan perlengkapan sekolah	768,500,000.00	699,441,000.00	69,059,000.00
9	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	734,230,000.00	593,120,115.00	141,109,885.00
10	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	200,000,000.00	194,405,000.00	5,595,000.00
11	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	4,110,000,000.00	3,507,659,000.00	602,341,000.00
12	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	150,000,000.00	140,206,000.00	9,794,000.00
13	Pelatihan kompetensi siswa berestasi	313,474,000.00	102,260,300.00	211,213,700.00
14	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	150,000,000.00	149,931,000.00	69,000.00
15	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	150,000,000.00	149,930,400.00	69,600.00
16	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	51,754,000.00	46,185,000.00	5,569,000.00
17	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	177,194,000.00	97,893,500.00	79,300,500.00
18	Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Yang Tidak Mampu Dan Siswa Berestasi Jenjang SD Dan SMP	2,500,000,000.00	1,998,551,700.00	501,448,300.00
19	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 001 Tanjung Redeb	228,600,000.00	226,200,000.00	2,400,000.00
20	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 002 Tanjung Redeb	320,400,000.00	319,854,000.00	546,000.00

21	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 003 Tanjung Redeb	169,800,000.00	169,800,000.00	-
22	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 004 Tanjung Redeb	313,800,000.00	308,834,400.00	4,965,600.00
23	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 005 Tanjung Redeb	123,600,000.00	123,600,000.00	-
24	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 006 Tanjung Redeb	145,200,000.00	145,200,000.00	-
25	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 007 Tanjung Redeb	282,000,000.00	255,750,000.00	26,250,000.00
26	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 008 Tanjung Redeb	144,000,000.00	144,000,000.00	-
27	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 009 Tanjung Redeb	130,800,000.00	130,800,000.00	-
28	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 010 Tanjung Redeb	196,800,000.00	196,800,000.00	-
29	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 011 Tanjung Redeb	206,400,000.00	197,170,000.00	9,230,000.00
30	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 012 Tanjung Redeb	100,800,000.00	100,800,000.00	-
31	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 013 Tanjung Redeb	143,400,000.00	143,400,000.00	-
32	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 014 Tanjung Redeb	123,000,000.00	123,000,000.00	-
33	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 015 Tanjung Redeb	163,800,000.00	163,800,000.00	-
34	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 017 Tanjung Redeb	160,800,000.00	160,800,000.00	-
35	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 018 Tanjung Redeb	296,400,000.00	295,858,000.00	542,000.00
36	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 019 Tanjung Redeb	172,200,000.00	172,200,000.00	-

37	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 020 Tanjung Redeb	233,400,000.00	233,400,000.00	-
38	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 021 Tanjung Redeb	327,000,000.00	318,300,000.00	8,700,000.00
39	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 022 Tanjung Redeb	153,000,000.00	151,920,000.00	1,080,000.00
40	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 001 Sambaliung	198,000,000.00	198,000,000.00	-
41	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 002 Sambaliung	108,600,000.00	108,600,000.00	-
42	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 003 Sambaliung	51,600,000.00	51,600,000.00	-
43	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 004 Sambaliung	63,900,000.00	63,900,000.00	-
44	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 005 Sambaliung	48,000,000.00	48,000,000.00	-
45	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 006 Sambaliung	68,518,000.00	68,518,000.00	-
46	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 007 Sambaliung	48,000,000.00	48,000,000.00	-
47	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 008 Sambaliung	48,000,000.00	48,000,000.00	-
48	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 009 Sambaliung	48,000,000.00	48,000,000.00	-
49	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 010 Sambaliung	102,000,000.00	102,000,000.00	-
50	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 011 Sambaliung	115,800,000.00	115,800,000.00	-
51	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 012 Sambaliung	115,800,000.00	115,800,000.00	-
52	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 013 Sambaliung	92,400,000.00	92,400,000.00	-

53	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 014 Sambaliung	238,800,000.00	238,800,000.00	-
54	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 015 Sambaliung	66,600,000.00	66,600,000.00	-
55	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 016 Sambaliung	80,600,000.00	80,600,000.00	-
56	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 017 Sambaliung	68,400,000.00	68,400,000.00	-
57	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 018 Sambaliung	48,000,000.00	48,000,000.00	-
58	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 019 Sambaliung	49,200,000.00	47,800,000.00	1,400,000.00
59	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 020 Sambaliung	73,800,000.00	73,800,000.00	-
60	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 021 Sambaliung	48,000,000.00	48,000,000.00	-
61	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 022 Sambaliung	48,000,000.00	47,990,000.00	10,000.00
62	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 023 Sambaliung	48,000,000.00	48,000,000.00	-
63	Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SDN 024 Sambaliung	48,000,000.00	48,000,000.00	-
64	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 025 Sambaliung	74,400,000.00	74,400,000.00	-
65	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 026 Sambaliung	116,400,000.00	116,400,000.00	-
66	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 027 Sambaliung	48,000,000.00	48,000,000.00	-
67	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 028 Sambaliung	48,000,000.00	48,000,000.00	-
68	Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SDN 029 Sambaliung	68,450,000.00	68,450,000.00	-

69	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 001 Gunung Tabur	147,000,000.00	147,000,000.00	-
70	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 002 Gunung Tabur	81,000,000.00	80,978,052.00	21,948.00
71	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 003 Gunung Tabur	130,200,000.00	124,575,000.00	5,625,000.00
72	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 004 Gunung Tabur	84,600,000.00	84,600,000.00	-
73	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 005 Gunung Tabur	73,200,000.00	73,200,000.00	-
74	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 006 Gunung Tabur	129,040,000.00	129,040,000.00	-
75	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 007 Gunung Tabur	48,000,000.00	48,000,000.00	-
76	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 008 Gunung Tabur	196,800,000.00	196,478,000.00	322,000.00
77	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 009 Gunung Tabur	104,400,000.00	104,400,000.00	-
78	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 010 Gunung Tabur	49,200,000.00	49,200,000.00	-
79	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 011 Gunung Tabur	48,000,000.00	47,990,000.00	10,000.00
80	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 012 Gunung Tabur	88,200,000.00	80,700,000.00	7,500,000.00
81	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 013 Gunung Tabur	72,000,000.00	72,000,000.00	-
82	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 014 Gunung Tabur	94,200,000.00	94,200,000.00	-
83	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 015 Gunung Tabur	218,400,000.00	218,400,000.00	-
84	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 016 Gunung Tabur	63,000,000.00	63,000,000.00	-

85	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 001 Talisayan	332,400,000.00	332,400,000.00	-
86	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 002 Talisayan	76,800,000.00	76,800,000.00	-
87	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 003 Talisayan	56,200,000.00	56,200,000.00	-
88	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 004 Talisayan	75,000,000.00	75,000,000.00	-
89	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 005 Talisayan	150,000,000.00	150,000,000.00	-
90	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 006 Talisayan	52,350,000.00	52,350,000.00	-
91	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 007 Talisayan	94,319,137.00	94,319,137.00	-
92	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 008 Talisayan	61,800,000.00	61,800,000.00	-
93	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 009 Talisayan	64,800,000.00	64,800,000.00	-
94	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 010 Talisayan	70,800,000.00	70,800,000.00	-
95	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 001 Pulau Derawan	143,400,000.00	142,700,000.00	700,000.00
96	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 002 Pulau Derawan	177,000,000.00	177,000,000.00	-
97	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 003 Pulau Derawan	48,000,000.00	48,000,000.00	-
98	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 004 Pulau Derawan	63,000,000.00	63,000,000.00	-
99	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 005 Pulau Derawan	202,200,000.00	202,200,000.00	-
100	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 006 Pulau Derawan	274,200,000.00	274,200,000.00	-

101	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 001 Kelay	72,000,000.00	72,000,000.00	-
102	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 002 Kelay	318,000,000.00	318,000,000.00	-
103	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 003 Kelay	81,600,000.00	81,600,000.00	-
104	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 004 Kelay	121,200,000.00	121,200,000.00	-
105	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 005 Kelay	57,610,000.00	57,610,000.00	-
106	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 006 Kelay	48,000,000.00	48,000,000.00	-
107	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 007 Kelay	48,000,000.00	48,000,000.00	-
108	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 008 Kelay	48,000,000.00	48,000,000.00	-
109	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 009 Kelay	48,000,000.00	48,000,000.00	-
110	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 010 Kelay	48,000,000.00	48,000,000.00	-
111	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 011 Kelay	48,000,000.00	48,000,000.00	-
112	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 012 Kelay	48,000,000.00	48,000,000.00	-
113	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 013 Kelay	48,000,000.00	48,000,000.00	-
114	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 014 Kelay	48,000,000.00	48,000,000.00	-
115	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 015 Kelay	75,000,000.00	75,000,000.00	-
116	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 016 Kelay	48,000,000.00	48,000,000.00	-

117	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 001 Segah	48,000,000.00	48,000,000.00	-
118	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 002 Segah	62,400,000.00	62,400,000.00	-
119	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 003 Segah	353,400,000.00	352,902,000.00	498,000.00
120	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 004 Segah	133,200,000.00	133,200,000.00	-
121	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 005 Segah	48,000,000.00	48,000,000.00	-
122	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 006 Segah	48,000,000.00	48,000,000.00	-
123	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 007 Segah	49,800,000.00	49,800,000.00	-
124	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 008 Segah	130,200,000.00	130,199,500.00	500
125	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 009 Segah	60,600,000.00	60,600,000.00	-
126	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 010 Segah	84,000,000.00	84,000,000.00	-
127	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 011 Segah	48,000,000.00	48,000,000.00	-
128	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 001 Biduk - Biduk	48,000,000.00	48,000,000.00	-
129	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 002 Biduk - Biduk	48,000,000.00	48,000,000.00	-
130	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 003 Biduk - Biduk	48,000,000.00	48,000,000.00	-
131	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 004 Biduk - Biduk	129,000,000.00	129,000,000.00	-
132	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 005 Biduk - Biduk	64,800,000.00	64,800,000.00	-

133	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 006 Biduk-Biduk	48,000,000.00	48,000,000.00	-
134	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 007 Biduk-Biduk	51,600,000.00	51,600,000.00	-
135	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 008 Biduk - Biduk	48,000,000.00	48,000,000.00	-
136	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 009 Biduk - Biduk	48,000,000.00	48,000,000.00	-
137	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 001 Teluk Bayur	212,400,000.00	212,400,000.00	-
138	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 002 Teluk Bayur	239,400,000.00	239,390,000.00	10,000.00
139	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 003 Teluk Bayur	154,200,000.00	154,200,000.00	-
140	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 004 Teluk Bayur	100,800,000.00	94,050,000.00	6,750,000.00
141	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 005 Teluk Bayur	212,400,000.00	212,400,000.00	-
142	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 006 Teluk Bayur	48,600,000.00	48,600,000.00	-
143	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 007 Teluk Bayur	87,600,000.00	87,600,000.00	-
144	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 008 Teluk Bayur	297,000,000.00	295,382,100.00	1,617,900.00
145	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 009 Teluk Bayur	132,600,000.00	132,600,000.00	-
146	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 010 Teluk Bayur	66,000,000.00	66,000,000.00	-
147	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 011 Teluk Bayur	95,400,000.00	95,400,000.00	-
148	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 012 Teluk Bayur	182,400,000.00	177,900,000.00	4,500,000.00

149	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 001 Maratua	54,300,000.00	54,300,000.00	-
150	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 002 Maratua	95,400,000.00	95,400,000.00	-
151	Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SDN 003 Maratua	107,400,000.00	107,400,000.00	-
152	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 004 Maratua	59,400,000.00	54,500,000.00	4,900,000.00
153	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 001 Tabalar	48,000,000.00	48,000,000.00	-
154	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 002 Tabalar	180,600,000.00	180,519,000.00	81,000.00
155	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 003 Tabalar	48,000,000.00	48,000,000.00	-
156	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 004 Tabalar	48,000,000.00	48,000,000.00	-
157	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 005 Tabalar	114,000,000.00	114,000,000.00	-
158	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 006 Tabalar	58,200,000.00	58,200,000.00	-
159	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 007 Tabalar	79,200,000.00	79,200,000.00	-
160	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 001 Biatan	48,000,000.00	48,000,000.00	-
161	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 002 Biatan	93,000,000.00	93,000,000.00	-
162	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 003 Biatan	183,600,000.00	183,600,000.00	-
163	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 004 Biatan	50,400,000.00	50,400,000.00	-
164	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 005 Biatan	132,000,000.00	131,767,069.00	232,931.00

165	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 006 Biatan	63,600,000.00	63,600,000.00	-
166	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 001 Batu Putih	142,800,000.00	142,800,000.00	-
167	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 002 Batu Putih	115,800,000.00	115,800,000.00	-
168	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 003 Batu Putih	123,000,000.00	123,000,000.00	-
169	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 004 Batu Putih	109,200,000.00	109,200,000.00	-
170	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 005 Batu Putih	63,600,000.00	63,600,000.00	-
171	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 006 Batu Putih	63,600,000.00	63,600,000.00	-
172	Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SDN 007 Batu Putih	48,000,000.00	48,000,000.00	-
173	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 1 Berau	507,600,000.00	506,508,000.00	1,092,000.00
174	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 2 Berau	532,800,000.00	532,800,000.00	-
175	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 3 Berau	380,700,000.00	367,123,000.00	13,577,000.00
176	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 4 Berau	516,600,000.00	516,600,000.00	-
177	Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMPN 5 Berau	261,000,000.00	261,000,000.00	-
178	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 6 Berau	271,800,000.00	271,800,000.00	-
179	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 7 Berau	102,600,000.00	102,600,000.00	-
180	Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMPN 8 Berau	475,200,000.00	474,930,000.00	270,000.00

181	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 9 Berau	533,700,000.00	529,599,500.00	4,100,500.00
182	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 10 Berau	72,000,000.00	72,000,000.00	-
183	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 11 Berau	252,000,000.00	248,150,000.00	3,850,000.00
184	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 12 Berau	378,900,000.00	378,900,000.00	-
185	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 13 Berau	185,400,000.00	181,320,000.00	4,080,000.00
186	Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMPN 14 Berau	461,700,000.00	460,800,000.00	900,000.00
187	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 15 Berau	342,000,000.00	337,308,200.00	4,691,800.00
188	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 16 Berau	161,100,000.00	160,975,000.00	125,000.00
189	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 17 Berau	342,000,000.00	341,980,000.00	20,000.00
190	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 18 Berau	188,100,000.00	188,100,000.00	-
191	Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMPN 19 Berau	180,900,000.00	179,500,000.00	1,400,000.00
192	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 20 Berau	110,700,000.00	110,686,500.00	13,500.00
193	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 21 Berau	148,500,000.00	148,500,000.00	-
194	Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMPN 22 Berau	239,400,000.00	239,400,000.00	-
195	Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMPN 23 Berau	88,200,000.00	88,200,000.00	-
196	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 24 Berau	72,000,000.00	72,000,000.00	-

197	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 25 Berau	90,000,000.00	90,000,000.00	-
198	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 26 Berau	89,100,000.00	89,100,000.00	-
199	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 27 Berau	176,400,000.00	176,080,000.00	320,000.00
200	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 28 Berau	103,500,000.00	103,300,000.00	200,000.00
201	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 29 Berau	160,200,000.00	160,200,000.00	-
202	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 30 Berau	72,000,000.00	72,000,000.00	-
203	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 31 Berau	109,800,000.00	109,800,000.00	-
204	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 32 Berau	101,700,000.00	101,700,000.00	-
205	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 33 Berau	98,100,000.00	98,100,000.00	-
206	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 34 Berau	294,300,000.00	291,900,000.00	2,400,000.00
207	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 35 Berau	93,600,000.00	93,600,000.00	-
208	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 36 Berau	72,000,000.00	72,000,000.00	-
209	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 37 Berau	72,000,000.00	72,000,000.00	-
210	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 38 Berau	91,800,000.00	91,800,000.00	-
211	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SLBN Tanjung Redeb	83,700,000.00	-	83,700,000.00
212	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 40 Berau	72,000,000.00	70,800,000.00	1,200,000.00

213	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 41 Berau	75,600,000.00	75,600,000.00	-
214	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 39 Berau	72,000,000.00	72,000,000.00	-
215	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SMPN 42 Berau	135,900,000.00	135,690,000.00	210,000.00
216	Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) SDN 30 Sambaliung	112,200,000.00	112,200,000.00	-
217	Pembangunan Sarana dan Prasarana SMP (DAK)	1,023,761,000.00	1,014,809,000.00	8,952,000.00
218	Pembangunan Sarana dan Prasarana SD (DAK)	3,386,145,000.00	2,332,060,500.00	1,054,084,500.00
219	Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS ) SD Negeri Berau	22,328,947,514.00	15,480,857,296.00	6,848,090,218.00
220	Bantuan Operasional Sekolah Nasional ( BOSNAS ) SMP Negeri Berau	11,083,146,575.00	5,778,042,512.00	5,305,104,063.00
221	Pengadaan Meubelair Sekolah Untuk Jenjang SLTP (Bankeu-P 2017)	2,000,000,000.00	1,971,787,000.00	28,213,000.00
<b>6</b>	<b>Program Pendidikan Menengah</b>	<b>1,821,430,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,821,430,000.00</b>
1	Penyediaan Beasiswa Murid dari Keluarga Tidak Mampu dan Murid Berestasi	1,821,430,000.00	-	1,821,430,000.00
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>3,158,658,300.00</b>	<b>1,972,119,935.00</b>	<b>1,186,538,365.00</b>
1	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	200,000,000.00	135,938,546.00	64,061,454.00
2	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	304,920,000.00	177,377,400.00	127,542,600.00
3	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	1,420,227,300.00	870,018,424.00	550,208,876.00

4	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	71,190,000.00	-	71,190,000.00
5	Pelatihan publikasi ilmiah bagi guru SMP/MTs tahun 2017	200,000,000.00	153,464,367.00	46,535,633.00
6	Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Fungsional Guru	97,041,000.00	88,622,398.00	8,418,602.00
7	Diklat kompetensi dan sertifikasi Kepala Sekolah	150,000,000.00	122,029,500.00	27,970,500.00
8	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Bagi Pendidikan Dasar	715,280,000.00	424,669,300.00	290,610,700.00
<b>8</b>	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	<b>5,378,880,000.00</b>	<b>3,549,885,587.00</b>	<b>1,828,994,413.00</b>
1	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	119,000,000.00	104,560,400.00	14,439,600.00
2	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	190,000,000.00	92,240,700.00	97,759,300.00
3	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	598,380,000.00	578,106,200.00	20,273,800.00
4	Pelatihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SD	250,000,000.00	179,415,980.00	70,584,020.00
5	Muatan Lokal Bahasa Inggris Jenjang SD/MI	1,920,000,000.00	1,096,565,800.00	823,434,200.00
6	Biaya Pengelolaan BOSDA Kabupaten Berau untuk Pendidikan Dasar dan Menengah	975,000,000.00	827,083,500.00	147,916,500.00
7	Penunjang Operasional Pelayanan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar	1,100,000,000.00	509,827,007.00	590,172,993.00
8	Supervisi Pengawas	226,500,000.00	162,086,000.00	64,414,000.00
		<b>161,936,627,100.00</b>	<b>139,756,631,370.00</b>	<b>22,179,995,730.00</b>

Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Tahun 2017 sebesar Rp. 161.936.627.100,00 digunakan dalam 8 program kegiatan antara lain: 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2). Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur; 3). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ; 4). Program Pendidikan Anak Usia Dini; 6). Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun; 7). Program Pendidikan menengah; 8). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Dan pagu Anggaran sebesar Rp. 161.936.627.100,00 yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap Rp. 139.756.631.370,00 sehingga persentase daya serap Anggaran Dinas Pendidikan kabupaten Berau sampai Tahun 2017 sebesar 86.30%.

Berikut Realisasi Kinerja Keuangan pada 8 (Delapan) Program dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau yang digunakan dalam pencapaian sasaran Startegis yang telah ditetapkan

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,** dari Anggaran sebesar Rp. 48.498.304.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 47.445.444.517,- dengan persentase 94.32%.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,** dari Anggaran sebesar Rp. 459.618.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 453.141.000,- dengan persentase 98.51%.
- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,** dari Anggaran sebesar 157.500.000,- telah terealisasi sebesar 144.252.000,- dengan persentase 95.33%

- 4. Program Pendidikan Anak Usia Dini,** dari Anggaran sebesar 469.286.050,- telah terealisasi 331.624.050,- dengan persentase 56.61%
- 5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,** dari Anggaran sebesar 101.992.950.750,- telah terealisasi sebesar Rp. 85.860.164.281,- dengan persentase 97.75%.
- 6. Program Pendidikan Menengah,** dari Anggaran sebesar Rp. 1.821.430.000,- Tidak Terealisasi,- dengan persentase 0 %.
- 7. Program Pendidikan Non Formal,** dari Anggaran sebesar Rp. 3.158.658.300,- telah terealisasi Sebesar Rp. 1.972.119.935,- dengan persentase 62.44%
- 8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan,** dari Anggaran sebesar Rp. 5.378.880.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 3.549.885.587,- dengan persentase 66.00%



Dari data perbandingan Antara Realisasi Anggaran tahun 2016 dan Realisasi Anggaran Tahun 2017, terdapat perubahan-perubahan yang signifikan dalam Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten diantaranya Pada tahun 2016 program Dinas Pendidikan Kabupaten Berau terdapat 10 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Berau sedangkan di tahun 2017 hanya 8 Program yang dilaksanakan.

Berikut penjelasan Perbandingan Realisasi Program Kegiatan tahun 2016 dan tahun 2016 :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,** pada tahun 2016 dari Anggaran Rp. 58.728.739.750,00,- hanya terealisasi sebesar Rp. 55.956.115.145,- dengan persentase 87% sedangkan pada tahun 2017 Anggaran sebesar Rp. 48.498.304.000,00,- telah terealisasi sebesar Rp. 47.445.444.517,00,- dengan persentase 94.32%. ada beberapa faktor yang mengakibatkan Realisasi tahun 2017 meningkat, diantaranya banyaknya pelaksanaan kegiatan yang telah terealisasi 100% dalam beberapa kegiatan.

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana,** pada tahun 2016 dari Anggaran Rp. 623.636.400,- hanya terealisasi sebesar Rp. 601.968.900,- dengan persentase 55% sedangkan pada tahun 2017 Anggaran sebesar Rp. 459.618.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 453.141.000,- dengan persentase 98.51%. jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kenaikan persentase realisasi tahun 2017 lebih

meningkat hal ini di karenakan Anggaran di tahun 2017 lebih rendah dari tahun sebelumnya dan realiasi program kegiatan mencapai 98.51 %

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,** Pada tahun 2017 Program ini tidak dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan kabupaten Berau hal ini dikarenakan adanya Keterbatasan Anggaran dalam pelaksanaanya, sedangkan di tahun 2016 program ini masih dilaksanakan dengan Anggaran Rp. 58.500.000,- yang telah terrealisasi Rp. 40.025.400,-

**4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,** jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Anggaran tahun 2017 lebih besar dengan Anggaran sebesar 157.500.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp. 144.252.000,- dengan persentase 95.33%, sedangkan pada tahun 2016 lebih Rendah dengan anggaran 95.000.000,- yang telah terealisasi sebesar 91.847.300,- dengan persentase 97% perbandingan persentasi realisasi ini tidak terlalu signifikan perubahannya dalam pelaksanaan program.

**5. Program Pendidikan Anak Usia Dini,** jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya anggaran tahun 2017 sama halnya dengan program yang lain, lebih rendah dari tahun sebelumnya dengan Anggaran sebesar 469.286.050,- yang telah terealisasi 331.624.050,- dengan persentase 56.61%. sedangkan pada tahun 2016 dengan anggaran 5.125.432.000,- yang telah terealisasi 94%

**6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,** jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Anggaran tahun 2017 lebih Besar dengan Anggaran sebesar 101.992.950.750,- telah terealisasi sebesar Rp. 85.860.164.281,- dengan persentase 97.75%. sedangkan pada tahun 2016 dengan anggaran 81.348.422.651,- realisasinya terserap 94% perbandingan persentasi realisasi ini tidak terlalu jauh hal ini menandakan banyaknya capaian-capaian yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program tersebut diantaranya terserapnya dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Pendidikan Dasar.

**7. Program Pendidikan Menengah,** untuk tahun 2017 Anggaran Program ini sebesar 1.821.430.000,- tetapi tidak bisa di realisasikan hal ini di karenakan Program tersebut telah di ambil alih oleh Dinas Provinsi Kalimantan Timur sedangkan di tahun 2016 program ini mempunyai anggaran 41.266.598.153,- yang telah terserap sebesar 38.254.730.064,- dengan persentase 93%

**8. Program Pendidikan Non Formal,** jika dibandingkan dengan tahun 2016 dari Anggaran tahun 2017 lebih besar yaitu sebesar Rp. 3.158.658.300,- telah terealisasi Sebesar Rp. 1.972.119.935,- dengan persentase 62.44% sedangkan pada tahun 2016 dengan anggaran sebesar 2.772.054.000,- dan telah terealisasi 84%, melihat dari nilai Anggaran 2017 ada beberapa faktor yang mengakibatkan meningkatnya

Anggaran tersebut diantaranya yaitu adanya penambahan Sekolah TK Negeri di beberapa Kecamatan.

**9. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,**

Pada tahun 2017 program ini tidak dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Berau di karenakan adanya keterbatasan anggaran, yang di tahun sebelumnya pernah dilaksanakan dengan anggaran 11.814.045.600,- yang terrealisasi 73 %

**10. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan,** pada tahun 2017 dari

Anggaran sebesar Rp. 5.378.880.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 3.549.885.587,-,- dengan persentase 66%, sedangkan pada tahun 2016 dengan anggaran 6.298.659.050,- hanya bisa terealisasi sebesar Rp. 5.148.791.128,- dengan persentase 82%

Dari hasil Pelaporan Kinerja yang memuat perbandingan Anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2016 maka terdapat 2 (dua) Program Dinas Pendidikan kabupaten Berau di tahun 2017 yang tidak terlaksana atau tidak ada anggarannya dimana program tersebut di tahun sebelumnya dilaksanakan program tersebut yaitu ; **1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ; dan 2. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.** Adapun 1 (satu) program yang mempunyai anggaran dan tidak dilaksanakan yaitu ; **Program Pendidikan Menengah,** hal ini di karenakan adanya pengambil alihan program pendidikan menengah oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-iP) tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggung jawaban Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2017. Sebagai bagian dan pelaksanaan amanah, kewajiban dan rasa tanggungjawab, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) di dunia pendidikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-iP) tahun 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Berau tahun 2017 menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dan 8 program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2016 Dinas Pendidikan Kabupaten Berau.

Akhirnya Berkat Kerja Keras serta ketekunan Tim dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-iP) ini dapat disusun hingga selesai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-iP) Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Tahun 2016 dibuat sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat.

TerimaKasih,